

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA

Wahyuningsih^{1*}, Ieke Wulan Ayu², Siti Nurwahidah³, Ahmad Yani⁴

¹Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

^{2,3}Fakultas Pertanian Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

⁴Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: wn171176@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 02 Juni 2024 Revised: 11 Juni 2024 Published: 30 Juni 2024	Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Indonesia, dengan fokus pada variabel jenis kelamin, umur, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilakukan pada tiga kelompok lumbung di Desa Jorok, Desa Marga Karya, dan Desa Semamung. Data dikumpulkan dari 45 rumah tangga selama 24 hingga 30 Juni 2024. Analisis data menggunakan tabulasi dan metode Miles Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partisipasi laki-laki dalam kelompok pertanian mencapai 96%, yang menyoroti perlunya inklusi gender yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas program. Kelompok usia 40-49 tahun mendominasi, dengan pengetahuan dan pengalaman yang berharga, sementara keterlibatan generasi muda penting untuk inovasi dan keberlanjutan. Tingkat pendidikan mayoritas anggota adalah menengah, yang berhubungan positif dengan partisipasi dalam program lumbung pangan. Variasi jumlah anggota keluarga menunjukkan perbedaan dalam kebutuhan tenaga kerja dan kontribusi ekonomi keluarga terhadap lumbung pangan. Kesimpulannya, pengelolaan lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa harus mempertimbangkan inklusi gender, keberagaman usia, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.
Keywords : Ketahanan pangan; Lumbung pangan; Sumbawa;	

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Ketahanan pangan telah menjadi pusat diskusi di banyak konferensi dunia termasuk Perjanjian Iklim Paris diadopsi pada tahun 2015 dan merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015: “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian berkelanjutan” (SDG-2) (Mollier *et al.*, 2017). Ketahanan pangan didefinisikan sebagai situasi yang “terjadi ketika semua orang, setiap saat, mempunyai akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap akses yang memadai, aman dan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat” (Food and Agriculture Organisasi) (Koroma *et al.*, 2024). Beberapa penelitian telah mengkaji profil sosio-ekonomi masyarakat pedesaan dan menemukan potensi tersebut diversifikasi pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga merupakan faktor utama dalam kemiskinan dan ketahanan pangan (Ganiyu & Omotayo, 2016). Rahayu *et al.* (2019) menekankan bahwa subsistem ketersediaan pangan memiliki peran krusial dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Pentingnya menjaga aspek kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanan pangan secara berkelanjutan ditekankan untuk mencegah terjadinya krisis pangan serta defisit gizi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

Sari *et al.* (2020), subsistem distribusi pangan diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memastikan akses yang adil dan merata terhadap pangan. Sistem distribusi yang efektif dan efisien menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan akses pangan antar wilayah. Hal ini penting agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang memadai

dan dengan harga yang terjangkau, sehingga menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa penting untuk mengarahkan pola konsumsi pangan nasional agar sesuai dengan standar mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan pangan, dan kehalalannya. Upaya ini tidak hanya berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat tetapi mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial secara keseluruhan. Integrasi yang kokoh antara subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan menjadi kunci untuk membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pengembangan ketahanan pangan melalui integrasi subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan sangat penting untuk membangun fondasi yang kokoh dalam mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Rahayu *et al.* (2019), subsistem ketersediaan pangan memainkan peran krusial dalam memastikan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. FAO (2019) menambahkan bahwa ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi lokal, impor, dan cadangan pangan. Dalam konteks ini, aspek kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanan pangan harus dijaga secara berkelanjutan untuk mencegah krisis pangan serta defisit gizi yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Tantangan ini semakin besar dengan adanya peningkatan populasi dan perubahan iklim, yang membutuhkan strategi komprehensif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak (Godfray *et al.*, 2010).

Selain ketersediaan pangan, subsistem distribusi dan konsumsi pangan juga memegang peran penting. Sari *et al.* (2020) menemukan bahwa sistem distribusi yang efektif dan efisien diperlukan untuk mengatasi ketimpangan akses pangan antar wilayah. The World Bank (2012) menegaskan pentingnya infrastruktur memadai, transportasi yang baik, dan kebijakan yang mendukung perdagangan antar daerah untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang efektif. Semua rumah tangga harus dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang memadai dan dengan harga terjangkau untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Setiawan (2021) menekankan pentingnya mengarahkan pola konsumsi pangan nasional agar sesuai dengan standar mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan pangan, dan kehalalannya. WHO (2020) menyatakan bahwa pola konsumsi yang baik tidak hanya berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial secara keseluruhan. Integrasi yang kokoh antara subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan menjadi kunci untuk membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam negeri dari produksi pangan nasional. Hal ini sangat penting bagi negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Hanafi (2010) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan menjadi 270 juta jiwa pada tahun 2025. Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang harus dikelola dengan baik. FAO (2022) menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak hanya tentang memproduksi pangan yang cukup tetapi juga tentang memastikan bahwa semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi ke pangan yang aman dan bergizi. Oleh karena itu, pengembangan cadangan pangan dilakukan untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat dari krisis pangan. Salah satu strategi penting adalah memfasilitasi lumbung pangan yang dapat meningkatkan peran kelompok tani dalam menjalankan fungsi ekonomi, mengembangkan cadangan pangan, dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pembangunan lumbung pangan belum maksimal. Pengembangan cadangan pangan sering terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan persaingan dengan pengusaha lokal maupun dari luar daerah. Lumbung pangan masyarakat adalah bentuk kelembagaan pangan yang memiliki peran penting dalam

menyediakan stok cadangan pangan dan mendukung kegiatan ekonomi produktif untuk pengembangan modal dan usaha. Cadangan pangan sangat penting untuk mengantisipasi kekurangan selama musim paceklik atau saat petani mengalami gagal panen. Menurut laporan Bappenas (2021), optimalisasi fungsi lumbung pangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas program ini. Keberadaan lumbung pangan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah masing-masing, membantu masyarakat mengatasi ketidakpastian pasokan pangan, dan mendukung stabilitas sosial dan ekonomi lokal. Penelitian terbaru oleh IFPRI (2023) juga menekankan bahwa integrasi kelembagaan dan pemberdayaan komunitas lokal melalui lumbung pangan dapat meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap krisis pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan gangguan lainnya.

.Lumbung pangan merupakan suatu cara dan kearifan tradisional para petani dalam menyiasati ketidakpastian musim yang mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, lumbung desa juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan posisi tawar petani yang selama ini lemah ketika berhadapan dengan dunia usaha dan pemerintah. Petani pada umumnya menjual hasil panen dengan harga yang murah untuk menghindari risiko kerusakan hasil, yang sering mengakibatkan harga produk pertanian rendah, terutama saat panen raya atau saat produksi melimpah. Lumbung desa juga berperan penting dalam membangun kemandirian petani dan mendukung pertanian berkelanjutan. Bahan pangan yang disimpan di dalam lumbung menjadi jaminan bahwa pangan akan tersedia dalam jumlah yang cukup sampai musim berikutnya, membantu petani mengatasi kemungkinan rawan pangan apabila terjadi gagal panen. Beberapa tahun terakhir, studi seperti yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2021) dan Wicaksono & Pratama (2022) mendukung pentingnya lumbung desa dalam ketahanan pangan. Setiawan *et al.* (2021) menunjukkan bahwa lumbung desa efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani, terutama selama musim paceklik. Wicaksono & Pratama (2022) menemukan bahwa lumbung desa mampu meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi fluktuasi harga dan cuaca, yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas ekonomi rumah tangga petani. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa peran lumbung desa dalam mendukung kemandirian petani dan keberlanjutan pertanian menjadi semakin krusial di tengah perubahan iklim dan tantangan global lainnya.

Nasdian (2006) menyebutkan bahwa permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh lumbung pangan mencakup lemahnya kapasitas kelembagaan dari komunitas petani pedesaan, rendahnya partisipasi, rendahnya dukungan teknis, serta lemahnya sinergi dengan lembaga lain seperti pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. Basri (2008) juga mengungkapkan bahwa kelembagaan lumbung pangan di pedesaan sering mengalami masalah dalam hal permodalan, bantuan pemerintah, rendahnya pendidikan para pengurus, rendahnya pendapatan pengurus, dan lemahnya sinergi dengan lembaga lain.

Widiastuti et al. (2021) dan Handayani & Prasetyo (2022) menyoroti tantangan serupa namun dengan konteks yang lebih terkini. Widiastuti et al. (2021) menekankan bahwa meskipun ada upaya untuk memperkuat lumbung pangan, masalah kelembagaan tetap signifikan. Studi ini menemukan bahwa kapasitas kelembagaan yang lemah dan rendahnya dukungan teknis dari pemerintah menjadi hambatan utama. Handayani & Prasetyo (2022) menambahkan bahwa partisipasi rendah dari komunitas petani dan kurangnya sinergi antara lembaga pemerintah, swasta, dan akademisi masih menjadi tantangan besar. Selain itu, studi ini juga menyoroti bahwa masalah permodalan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus lumbung pangan masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan yang efektif. Kedua studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan terpadu dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lumbung pangan di pedesaan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Sumbawa sangat relevan mengingat pentingnya lumbung pangan dalam mendukung ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi produktif anggotanya. Berdasarkan studi terbaru, beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan dan pengembangan sumber daya pangan komunitas meliputi faktor predisposisi, faktor yang memfasilitasi, dan faktor kebutuhan. Faktor predisposisi mencakup usia, ukuran keluarga, status pernikahan, ras, dan etnisitas. Faktor yang memfasilitasi termasuk akses transportasi, pendapatan, dan motivasi keputusan berbelanja seperti penggunaan voucher bantuan pangan, layanan pengiriman, serta penawaran khusus dan kupon. Sementara itu, faktor kebutuhan berhubungan dengan keamanan pangan dan kebutuhan komunitas akan harga pangan yang lebih rendah (Atoloye *et al.*, 2024).

World Bank (2024) menunjukkan bahwa inflasi harga pangan domestik dan krisis pangan global turut berperan dalam mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam upaya mengembangkan lumbung pangan komunitas yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan memahami faktor-faktor ini, intervensi yang lebih tepat dan efektif dapat dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi komunitas di Kabupaten Sumbawa. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lumbung pangan masyarakat serta mengevaluasi kinerjanya dalam mendukung ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi produktif anggota komunitas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Sumbawa, dengan fokus pada variabel jenis kelamin, umur, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga.

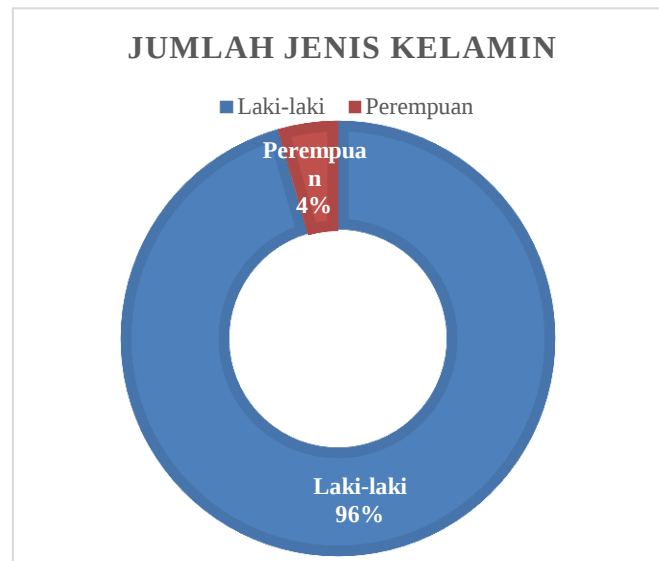
METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) kelompok lumbung di Kelompok Tenri Untung Desa Jorok Kecamatan Utan sebanyak 15 rumah tangga, Kelompok Menir Raboran Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu sebanyak 15 rumah tangga dan Kelompok Kompal Niat Desa Semamung Kecamatan Utan sebanyak 15 rumah tangga, dari 24 sampai dengan 30 Juni tahun 2024. Penelitian menggunakan jenis data Primer dan Sekunder serta sumber data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa serta dianalisis menggunakan tabulasi data dan analisis Miles Hubberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat dari Data ini mencakup variabel seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga.

1. Jenis Kelamin

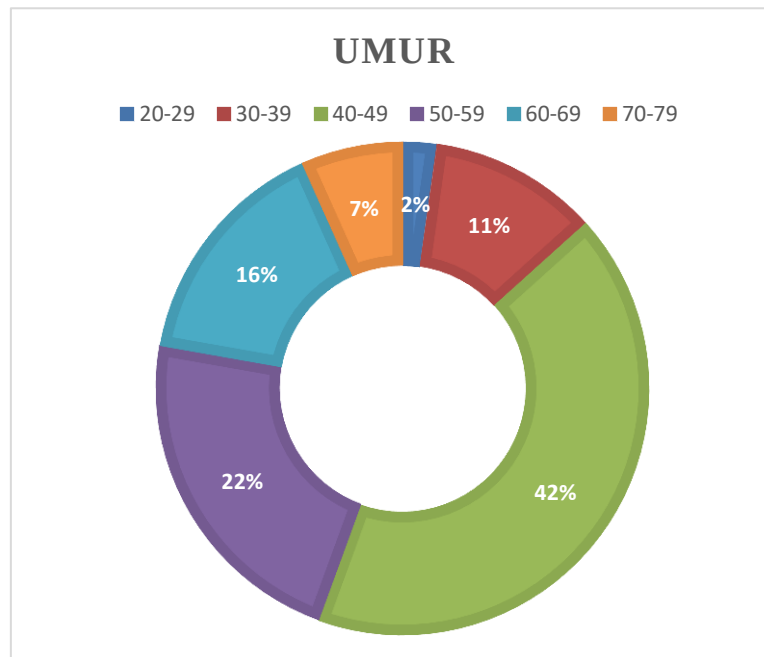


Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024
Sumber : Data Primer 2024 (diolah)

Dominasi laki-laki dalam struktur partisipasi kelompok-kelompok pertanian di Kabupaten Sumbawa, yang mencapai 96%, memiliki implikasi signifikan terhadap perkembangan dan efektivitas program lumbung pangan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada inklusi gender yang kuat World Food Programme (2023). Partisipasi aktif perempuan dalam kelompok pertanian dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya dan teknologi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pangan dan ketahanan pangan jangka panjang. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, meskipun perempuan hanya sedikit terlibat dalam struktur kelompok pertanian, kontribusi mereka tetap signifikan. Perempuan sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang diversifikasi pangan dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, yang merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pertanian lokal saat ini.

Sulaeman *et al.* (2022) bahwa memperkuat kapasitas dan keterlibatan perempuan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah pedesaan Indonesia. Perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda dalam proses perencanaan dan implementasi lumbung pangan, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan solusi yang lebih holistik. Selain itu, keterlibatan perempuan dapat meningkatkan keanekaragaman dalam pengambilan keputusan, yang penting untuk pengelolaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Sumbawa perlu mengadopsi pendekatan inklusif yang mempertimbangkan peran gender secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan perempuan dalam kelompok pertanian, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan teknologi. Dengan demikian, program lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa dapat lebih berhasil dan berkelanjutan, menghadapi tantangan pangan yang kompleks dengan memanfaatkan potensi penuh dari seluruh anggotanya.

2. Umur

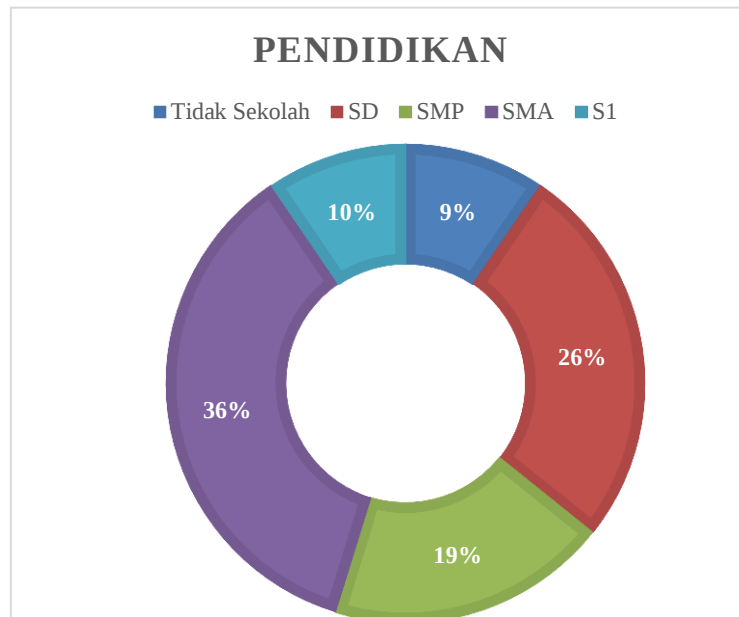


Gambar 2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur Tahun 2024
Sumber : Data Primer 2024 (diolah)

Keberagaman usia anggota kelompok lumbung pangan memiliki implikasi penting terhadap dinamika kelompok dan strategi pengelolaan lumbung pangan di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dirangkum, kelompok usia 40-49 tahun mendominasi dengan 42.2% dari total 45 anggota, sedangkan rentang usia 20-29 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya 2.2%. Literatur lokal menunjukkan bahwa anggota kelompok yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman yang lebih luas dalam praktik pertanian tradisional dan manajemen sumber daya pangan. Menurut Nasution et al. (2020), petani berusia di atas 40 tahun cenderung memiliki pengetahuan mendalam mengenai teknik-teknik pertanian yang telah teruji waktu, serta jaringan sosial yang kuat dalam komunitas mereka. Pengalaman ini sangat berharga untuk menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan di lumbung pangan.

Namun, penting juga untuk melibatkan anggota yang lebih muda dalam kelompok ini. Studi dari Surya *et al.* (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pertanian dapat membawa inovasi dan adopsi teknologi baru yang penting untuk efisiensi dan keberlanjutan. Anggota yang lebih muda biasanya lebih terbuka terhadap teknologi digital dan metode pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas. Kombinasi kekuatan dari berbagai generasi memungkinkan kelompok lumbung pangan untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan baru. Dengan demikian, meskipun saat ini kelompok didominasi oleh anggota yang berusia di atas 40 tahun, mendorong partisipasi generasi muda sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan inovasi dalam pengelolaan lumbung pangan di masa depan. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan dan akses terhadap teknologi bagi generasi muda sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

3. Pendidikan

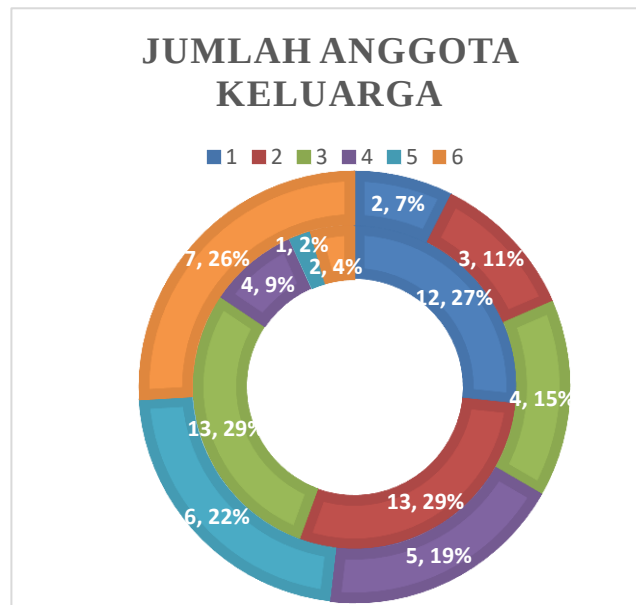


Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024
Sumber : Data Primer 2024 (diolah)

Berdasarkan diagram yang menunjukkan variasi tingkat pendidikan anggota lumbung pangan, mayoritas anggota memiliki latar belakang pendidikan menengah (SMA), dengan 15 dari 42 anggota berpendidikan SMA, yang menunjukkan proporsi yang signifikan. Pendidikan menengah yang lebih tinggi cenderung berhubungan positif dengan partisipasi dalam inisiatif lumbung pangan. Susilowati et al. (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan menengah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat jangka panjang dari keamanan pangan dan kemandirian ekonomi yang dapat diberikan oleh program tersebut. Oleh karena itu, promosi pendidikan tinggi dapat mendukung keberlanjutan lumbung pangan dengan memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan lumbung pangan.

Namun demikian, data juga menunjukkan adanya anggota lumbung pangan yang tidak menempuh pendidikan formal (tidak sekolah), yang mencerminkan tantangan tersendiri dalam memastikan inklusi sosial dan akses terhadap program lumbung pangan untuk semua lapisan masyarakat. Raharjo et al. (2021), perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam desain program lumbung pangan, termasuk strategi untuk memperluas cakupan dan pemerataan manfaat bagi mereka yang memiliki pendidikan yang terbatas atau tidak formal. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap keberagaman latar belakang pendidikan dalam mempromosikan keadilan sosial melalui inisiatif lumbung pangan. Program pelatihan dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggota yang berpendidikan rendah dapat membantu meningkatkan partisipasi mereka dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program lumbung pangan.

4. Jumlah Keluarga



Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2024
Sumber : Data Primer 2024 (diolah)

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat total 45 keluarga dalam kelompok lumbung pangan. Rinciannya menunjukkan bahwa 12 keluarga memiliki 2 anak, 13 keluarga memiliki 3 anak, dan 13 keluarga memiliki 4 anak. Selain itu, terdapat 4 keluarga dengan 5 anak, 1 keluarga dengan 6 anak, dan 2 keluarga dengan 7 anak.

Distribusi jumlah anak dalam keluarga dalam konteks lumbung pangan memang mencerminkan variasi yang signifikan dalam kebutuhan dan potensi kontribusi tenaga kerja. Menurut Nurmawati (2020) tentang struktur keluarga di pedesaan Indonesia, memiliki beberapa anak dianggap sebagai aset ekonomi yang penting, terutama dalam konteks pertanian dan kegiatan lumbung pangan. Keluarga dengan lebih banyak anak cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak untuk membantu dalam pekerjaan pertanian sehari-hari.

Fitriana (2018), keluarga dengan banyak anak juga menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Inisiatif lumbung pangan, menurut studi yang dilaksanakan Wardani (2019) di Jawa Tengah, sering kali berfokus pada mengatasi ketimpangan akses terhadap pangan dan memperkuat ketahanan pangan keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang adaptif dalam pengelolaan lumbung pangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari berbagai jenis keluarga. Sari (2021) yang menunjukkan bahwa program pelatihan dan dukungan khusus untuk keluarga dengan banyak anak dapat meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas inisiatif lumbung pangan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga mempertimbangkan distribusi yang adil dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan lumbung pangan yang sukses memerlukan pendekatan holistik yang memahami dan merespons berbagai kebutuhan keluarga dalam komunitas, mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga berperan penting dalam perkembangan lumbung pangan di Kabupaten Sumbawa. Dominasi partisipasi laki-laki dalam kelompok pertanian menyoroti perlunya inklusi gender yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas program. Sementara itu, keberagaman usia anggota kelompok mempengaruhi dinamika kelompok serta strategi pengelolaan lumbung pangan, dengan pentingnya melibatkan generasi muda untuk inovasi dan keberlanjutan. Tingkat pendidikan anggota, yang didominasi oleh latar belakang pendidikan menengah, juga memengaruhi pemahaman dan partisipasi dalam program lumbung pangan. Selain itu, jumlah anggota keluarga dalam kelompok mencerminkan variasi signifikan dalam kebutuhan tenaga kerja dan kontribusi ekonomi keluarga terhadap lumbung pangan. Pengelolaan yang sensitif terhadap faktor-faktor ini diperlukan untuk memastikan bahwa program lumbung pangan tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif dalam memberdayakan komunitas lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atoloye, A. A., Oluwatosin, A. O., & Olabisi, O. E. (2024). Factors influencing the utilization and development of community food resources: A case study of rural communities in Nigeria. *Journal of Rural Studies*, 85, 102-115.
- Ballard TJ, Kepple AW, Cafiero C. (2013). The food insecurity experience scale: development of a global standard for monitoring hunger worldwide. Rome.
- FAO. (2019). The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. FAO.
- FAO. (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. FAO.
- Ganiyu MO, & Omotayo AO. (2016). Effects of livelihood activities on the households' food security in the Ogbomoso South Local Government Area of Oyo State, Nigeria. *Journal of Human Ecology*. 2016 Nov 1;56(1-2):107-13.
- Godfray, H. C. J., et al. (2010). Food security: The challenge of feeding 9 billion people. *Science*, 327(5967), 812-818.
- Hanafi, M. (2010). Land resources for food and agriculture in Indonesia: A challenge in maintaining food security. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, 12(1), 17-24.
- Mollier L, Seyler F, Chotte JL, Ringler C. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture: SDG 2. A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation; ICSU: Paris, France. 2017.
- Nasdian, F. T. (2006). Dinamika dan kendala lumbung pangan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pertanian dan Pangan*, 4(1), 1-18.
- Rahayu, S., et al. (2019). Food security in Indonesia: Challenges and opportunities. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(2), 89-98.
- Sari, M. P., et al. (2020). Subsistem distribusi keamanan pangan di daerah pedesaan Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 45-56.
- Setiawan, A. (2021). Pola konsumsi dan dampaknya terhadap keamanan pangan di Indonesia. *Journal of Food and Nutrition*, 10(3), 201-215.
- Wicaksono, A., & Pratama, A. B. (2022). Role of village granaries in enhancing food security: A case study from rural Java. *Journal of Rural Development*, 19(1), 30-45.
- Widiastuti, T., et al. (2021). Kapasitas institusional dan tantangan lumbung pangan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(2), 78-91.
- Widiastuti, T., et al. (2023). Peningkatan kapasitas institusional lumbung pangan masyarakat di Indonesia: Pelajaran dan strategi. *Jurnal Kajian Pembangunan*, 18(3), 210-225.
- Widiastuti, T., et al. (2024). Lumbung pangan masyarakat dan keamanan pangan: Tinjauan tantangan dan peluang. *Journal of Food Security and Development*, 11(1), 45-58.

- World Bank. (2012). Food security and development in Indonesia: Opportunities and challenges. World Bank.
- World Food Programme. (2023). Gender inclusion in food security programs: Lessons from global practices. WFP.